

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Literatur pertama dengan judul “Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua” oleh Ahmad Sabir (Sabir, 2018). Jurnal ini membahas mengenai bagaimana implementasi diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu sebagai negara yang mendukung separatisme melalui tiga dimensi diplomasi publik yang dikemukakan oleh Leonard, Stead dan Smewing.

Dimensi pertama membahas mengenai manajemen berita, tanggapan Indonesia terhadap munculnya pernyataan Vanuatu terhadap Isu HAM di Papua. Indonesia menunjukkan data-data terkait dan menulis laporan dengan judul ‘No. Genocide in West Papua’.

Pada tahap dimensi kedua, yaitu komunikasi strategis, di mana Indonesia membuat pernyataan bahwa ras melanesia bukan hanya di Papua saja, melainkan juga terdapat di Maluku dan NTT. Untuk membentuk komunikasi strategis, Indonesia membentuk Persaudaraan Masyarakat Indonesia (Melindo), dan mengadakan pameran Festival Budaya Melanesia VI. Semua program kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, atau dapat dikatakan bahwa Actor-State sangat mendominasi.

Kemudian yang terakhir, dimensi ketiga, mengenai membangun relasi. Indonesia menjalin kerja sama dengan Vanuatu melalui berbagai aspek. Namun

sangat disayangkan lagi-lagi aktor negara menjadi seseorang yang mendominasi dalam membangun relasi dalam rangka melakukan diplomasi publik.

Literatur ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai usaha Indonesia dalam menghentikan dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat dalam menjaga kedaulatan NKRI, dalam literatur ini juga berfokus pada bagaimana kritik Vanuatu terhadap Indonesia. Literatur ini meneliti bagaimana kegagalan diplomasi Indonesia melalui teori diplomasi yang dikemukakan oleh Leonard, Stead dan Smewing, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana keberhasilan '*Pacific Elevation*' dalam mengatasi dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat.

Literatur kedua dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016.” Yang ditulis oleh Rianda, Djemat, dan Rahmat pada tahun 2017 (Rianda et al., 2017). Jurnal tersebut menggunakan Kebijakan Luar Negeri oleh N. Rosenau, di mana terdapat tiga aspek yang dapat mengukur tindakan kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu dukungan Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua.

Aspek pertama terdapat orientasi, dalam aspek ini Indonesia mengutamakan prinsip politik bebas aktif dan berkomitmen untuk milih jalan damai, yang kemudian tindakan Indonesia terhadap Vanuatu lebih cenderung menggunakan jalan persuasi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Kemudian yang kedua terdapat aspek komitmen, di mana Indonesia melakukan serangkaian rencana dan komitmen seperti penyelenggaraan

Memorandum of Understanding (Mou) antara ketua DPR RI dan ketua parlemen Vanuatu pada 23 April 2015 di Senayan, Jakarta, bertepatan dengan Konferensi Parlemen Asia-Afrika.

Aspek yang terakhir adalah rencana aksi dan bentuk perilaku atau aksi, Indonesia melakukan banyak diplomasi dan rencana terhadap Vanuatu; 1) Memberikan mindset bahwa Vanuatu merupakan negara sahabat Indonesia. 2) Memberikan Foreign Aid berupa sumbangan pasca bencana Topan Pam. 3) Kerja sama antar kepolisian, Indonesia memberikan pelatihan terhadap polisi Vanuatu dan memberikan sejumlah sumbangan berupa perlengkapan seragam polisi. Jurnal ini menilai bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang Low Profile dan tetap konsisten dalam melakukan diplomasi berhasil dalam mengubah pandangan Vanuatu pada saat itu, ditandai dengan berhentinya kritikan terhadap Indonesia pada tahun 2015.

Singkatnya, literatur ini berfokus pada bagaimana Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua melalui kritiknya saat PBB dan menggunakan alat-alat persuasi sebagai bentuk penerapan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan memiliki teori yang sama yaitu Kebijakan Luar Negeri yang dikemukakan oleh Rosenau. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara jurnal literatur dengan penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai periode dan peneliti berfokus pada '*Pacific Elevation*'. Jurnal literatur ini tidak membahas mengenai *Pacific Elevation* dan hanya membahas mengenai prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif beserta implementasinya di Vanuatu.

Literatur ketiga yang berjudul “Diplomasi *Soft Power* Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* terhadap United Liberation Movement for West Papua” yang ditulis oleh Muhammad Afif Maulana Roziqi (Roziqi, 2020). Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai *Soft Power* Indonesia melalui instrumen kebudayaan, nilai dalam negeri dan kebijakan luar negeri.

Dalam instrumen kebudayaan, Indonesia memiliki program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) yang ditujukan pada negara-negara asing yang ingin mempelajari buday Indonesia. Indonesia membuat kegiatan Festival Budaya Melanesia pada tahun 2015 di Kupang, NTT, dan dihadiri oleh negara-negara Pasifik, salah satunya Vanuatu. Selain mengadakan kegiatan festival untuk mengembangkan udaya Melanesia, Indonesia pula berpartisipasi dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh negara-negara Pasifik, yaitu Melanesia Arts and Cultural Festival (MACFest) 6th tahun 2018 di Kepulauan Solomon.

Dalam instrumen dalam negeri, Indonesia mengembangkan nilai-nilai yang terdapat di Papua melalui pengembangan otonomi, penerapan bhinekaan pada budaya Papua, dan pembangunan dan pemerataan di daerah Papua, dan terakhir mengenai partisipasi masyarakat Papua di pemerintah pusat.

Kemudian instrumen yang terakhir adalah kebijakan luar negeri, Indonesia mengembangkan nilai-nilai dalam negeri untuk disebarluaskan melalui Bali Democracy Forum (BDF). BDF diciptakan bertujuan untuk memwadahi dialog mengenai pengalaman yang bersifat membangun dan mencapai kerjasama demokrasi.

Pada literatur ini, dijelaskan mengenai bagaimana upaya diplomasi Indonesia terhadap isu dukungan pada kemerdekaan Papua sama seperti penelitian yang

peneliti lakukan, namun literatur ini berfokus pada organisasi kawasan seperti MSG (*Melanesian Spearhead Group*) diplomasi dilakukan pada aspek kebudayaan dan upaya Indonesia dalam pembangunan di daerah Papua juga berfokus pada pengembangan nilai-nilai dalam negeri. Sedangkan peneliti berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia yang baru yaitu '*Pacific Elevation*' dan implementasinya di negara-negara kawasan Pasifik dengan tujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara Indonesia dengan negara di Pasifik, yang kemudian berpengaruh pada dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat, karena Vanuatu bagian dari negara pasifik dan juga merupakan negara yang sangat getol dalam mengkritik dan melakukan tuduhan terhadap Indonesia di dalam forum PBB.

Literatur keempat yang berjudul “ Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vanuatu Terkait Dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) “ yang ditulis oleh Yesica Purtri, Fernando dan Stefan (Putri Prisia Angeli Adi et al., 2022). Jurnal ini meneliti bagaimana hubungan Indonesia dan Vanuatu saat konflik mengenai Papua Barat terjadi. Indonesia dan Vanuatu memiliki kerjasama bilateral, diantaranya: 1) Penandatanganan Komunike Bersama pada tahun 1995 mengenai dukungan Vanuatu terhadap politik luar negeri Indonesia saat Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. 2) Kerjasama untuk membantu Vanuatu yang terdampak badai topan pam pada 2015. 3) Penandatanganan *Development Cooperation Agreement* tentang kerjasama pembangunan.

Vanuatu dan Indonesia juga menjalin kerjasama secara regional dalam organisasi Melanesian Spearheada Group (MSG). Dalam merespon pertanyaan

Vanuatu yang mendukung Organisasi Papua Merdeka, Indonesia melakukan beberapa tindakan untuk terhadap Papua Barat dalam menyelesaikan perpecahan, diantaranya: 1) Mengirimkan tentara pada daerah konflik 2) membuat otomi daerah di Papua. 3) Pembangunan ekonomi dan perbaikan sosial budaya.

Pada jurnal ini, tidak hanya membahas Vanuatu, tetapi juga membahas organisasi MSG. Dan juga bagaimana Indonesia memberikan kebijakan pada Papua Barat dan implementasinya untuk memperbaiki Papua. Penelitian yang peneliti lakukan hanya mengenai Vanuatu, dan hanya sedikit membahas mengenai hubungan Indonesia dengan negara lain sebagai bantuan untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti meneliti mengenai *Pacific Elevation* yang Indonesia keluarkan pada 2019 sebagai kebijakan luar negeri dalam merespon tindakan yang dilakukan negara-negara Pasifik terutama Vanuatu, dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Literatur lima yang berjudul “*Disaster Relief as Indonesia Soft Power Diplomacy Case of Cyclone Pam in Vanuatu*” yang ditulis oleh Vrameswari, Deffi dan Sobar (Wati et al., 2018). Literatur ini menggunakan tiga konsep dan satu teori dalam melakukan penelitiannya, yaitu konsep bantuan bencana, konsep respon *emergency response decision making process*, dan konsep diplomasi, kemudian satu teori yaitu teori *Soft Power*. Jurnal ini dimulai dengan memaparkan identifikasi masalah yang dihadapi kedua negara dalam fenomena terkait. Vanuatu merupakan negara yang memberikan dukungan terhadap masyarakat Papua, lebih spesifiknya terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan bagian dari wilayah dan kedaulatan Indonesia. Melalui pernyataan dari Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses pada sidang HAM PBB di Jenewa tahun 2014. Pertanyaan

tersebut menjadi ancaman pada integritas nasional dan citra Indonesia di mata dunia karena isu domestik yang meningkat menjadi tingkatan internasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan persahabatan dengan Vanuatu.

Pada Maret 2015, Vanuatu dilanda bencana Topan Pam sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menerima bantuan internasional. Pengalaman Indonesia dalam penanggulangan bencana dan melihat kondisi Vanuatu yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi Topan Pam memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempererat hubungan persahabatan dengan Vanuatu dan mempertahankan kedaulatan. Indonesia juga ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki ikatan Melanesia dengan Vanuatu melalui bantuan bencana. Literatur ini mengamati bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari penggunaan *Soft Power* oleh Indonesia melalui diplomasi bencana. Upaya ini dianalisis sebagai upaya untuk memperoleh citra positif Indonesia di mata dunia serta sebagai upaya untuk melawan dukungan Vanuatu terhadap penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Literatur ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu terkait pernyataan yang dikemukakan oleh Vanuatu di sidang HAM PBB. Namun jurnal ini hanya berfokus pada bantuan bencana yang diberikan oleh Indonesia pada Vanuatu yang disinyalir berhasil untuk mengubah citra Indonesia pada periode tersebut. Peneliti melakukan riset mengenai '*Pacific Elevation*' yang berkomitmen untuk melakukan kerjasama baik secara bilateral maupun secara regional, Indonesia juga berkomitmen untuk membantu negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu di dalamnya. Bantuan tersebut juga berupa bantuan terhadap bencana alam yang terjadi 2023 mei lalu.

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Teori	Masalah	Kesimpulan
1	Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua.	Teori Diplomasi Publik oleh Leonard. Stead, Smewing (2002)	Apa yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dinilai lemah untuk memengaruhi sikap politik Vanuatu untuk berhenti mendukung separatisme Papua?	Jurnal ini menggunakan teori diplomasi publik yang dikemukakan oleh Leonard, Stead dan Smewing dalam meneliti fenomena mengenai diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu sebagai upaya untuk mengurangi dukungan Vanuatu terhadap gerakan separatisme di Papua. Singkatnya jurnal ini menilai bahwa diplomasi Indonesia dinilai gagal dalam menciptakan citra yang baik dan mengurangi dukungan Vanuatu terhadap separatisme Papua. Hal tersebut dapat diukur melalui tiga dimensi. Pertama, diplomasi Indonesia dinilai gagal karena masih menggunakan variable aktor state sebagai dominasi dalam melakukan diplomasi publik. Sementara aktor non-state memiliki kontribusi yang sedikit dalam membangun relasi antar kedua negara tersebut. Kedua, diplomasi yang dilakukan dibangun tanpa lembaga yang khusus menangani fenomena tersebut. Dalam menanggapi berita yang muncul atau pernyataan

				<p>oleh Vanuatu, Indonesia butuh lembaga khusus dalam mengatur komunikasi strategi yang terkordinasi agar respon dari Indonesia tepat pada sasaran audiens, Indonesia juga membutuhkan manajemen berita untuk mengolah kembali berita yang memunculkan tuduhan yang muncul seperti pertanyaan Vanuatu terkait pelanggaran HAM di Papua. Ketiga, diplomasi Indonesia cenderung lemah untuk memengaruhi Vanuatu karena adanya doktrin Melanesian Renaissance. Salah satu Perdana Menteri Vanuatu, Sato Killman, bahkan dilengserkan menggunakan mosi tidak percaya akibat menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia dan dianggap tidak menghormati sejarah, ras, dan etnis yang terkandung dalam Melanesian Renaissance.</p>
2	<p>Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016.</p>	<p>Kebijakan Luar Negeri oleh N. Rosenau.</p>	<p>Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia untuk mengatasi dukungan vanuatu terhadap separatisme Papua melalui alat-alat persuasi</p>	<p>Jurnal ini menggunakan teori kebijakan luar negeri yang ditulis oleh N. Rosenau dalam meneliti fenomena mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua pada periode 2015-2016, menurut N. Rosenau kebijakan luar negeri dapat dilihat dari tiga aspek</p>

			<p>tanpa hard power.</p>	<p>yaitu sekumpulan orientasi, seperangkat komitmen dan rencana aksi dan bentuk perilaku atau aksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam aspek orientasi, Indonesia mengedepankan semangat bersama tanpa ada dominasi di suatu kawasan, dimana ketika terdapat negara yang menggagu kedaulatan indonesia, Indonesia memilih untuk menggunakan alat-alat persuasi dibanding hardpower seperti militer. • Kedua, dalam aspek komitmen, Indonesia menggunakan strategi diplomasi menyamakan momentum MoU antara Ketua DPR RI Setya Novanto dan Ketua Parlemen Vanuatu Philip Boedoro dengan penyelenggaraan Parlemen Asia-Afrika. Dalam konteks ini, Indonesia dan Vanuatu bisa menjalin kerja sama dibawah kerangka program kemitraan selama 2014-2018. • Selanjutnya kebijakan luar negeri Indonesia ditinjau dari aspek perilaku dan aksi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memandang negara Vanuatu sebagai negara sahabat 2. Memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban topan pam di Vanuatu. 3. Memberikan bantuan kerjasama kepolisian
--	--	--	--------------------------	---

				4. Menggunakan strategi <i>people to people contact</i> . Pada akhir kata, penulis mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dinilai berhasil memengaruhi republik vanuatu.
3	Diplomasi <i>Soft Power</i> Indonesia dalam <i>Melanesian Spearhead Group</i> terhadap United Liberation Movement for West Papua	Teori <i>Soft Power</i> oleh Josep Nye.	Bagaimana Indonesia dapat memengaruhi <i>Melanesia Spreadhead Group</i> (MSG) menggunakan <i>Soft Power</i> yang dimiliki Indonesia dalam membendung dukungan MSG terhadap ULMWP?	Jurnal ini berfokus pada organisasi regional <i>Melanesia Spearhead Group</i> (MSG) dalam dukungannya terhadap <i>United Liberation Movement for West Papua</i> (ULMWP). Indonesia sebagai salah satu anggota dari MSG itu sendiri, berupaya membangun citra positif dikalangan anggota MSG dengan menggunakan <i>Soft Power</i> dalam melakukan diplomasi. Indonesia menggunakan budaya, nilai-nilai dalam negeri, dan kebijakan luar negeri.
4	Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vanuatu Terkait Dengan Pernyataan Vanuatu Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)	Teori Diplomas	Bagaimana hubungan diplomatik Indonesia dan Vanuatu dan bagaimana sikap Indonesia pada pernyataan Vanuatu yang mendukung OPM?	Jurnal ini berfokus pada hubungan diplomati Indonesia ditengah terjadinya konflik akibat dukungan Vanuatu terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Indonesia melakukan kerjasama dengan Vanuatu, secara bilateral maupun multilateral di dalam organisasi regional <i>Melanesia Spearhead Group</i> (MSG) dan pada KTT Asia-Africa. Kerjasama ini menghantarkan Indonesia pada pembukaan Kedutaan Besar Indonesia untuk Vanuatu yang berlokasi di Canberra,

				Australia. Sejauh ini, pemerintah Indonesia mengambil tindakan persuasi dan jalan damai dalam menciptakan citra positif terhadap Vanuatu.
5	Disaster Relief as Indonesia <i>Soft Power</i> Diplomacy Case of Cyclone Pam in Vanuatu	Konsep <i>disaster relief, emergency response decision making process, diplomasi. Teori Soft Power</i>	Bagaimana proses bantuan bencana alam yang disediakan Indonesia untuk Vanuatu? Bagaimana bantuan bencana alam dapat dijadikan sebagai <i>Soft Power</i> untuk diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Vanuatu?	Jurnal ini memberikan dua kesimpulan atas penelitiannya terhadap bantuan bencana alam oleh Indonesia terhadap Vanuatu terkait dukungannya terhadap OPM. Proses bantuan bencana alam yang dilakukan Indonesia terhadap Vanuatu untuk mengatasi efek dari Topan Pam sejalan dengan tahapan respon darurat dalam proses <i>decision making</i> . Indonesia menggunakan sektor pangan dan non pangan sebagai prioritas dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana dan melakukan rehabilitasi terhadap infrastruktur yang rusak. Bantuan bencana tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk melakukan diplomasi. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan <i>Soft Power</i> dalam menggunakan hubungan bilateral dengan Vanuatu. Bantuan bencana yang diberikan Indonesia kepada Vanuatu membuka peluang untuk mendekati pemerintah Vanuatu untuk hubungan yang lebih baik di masa depan terutama terkait dengan isu Papua.

2.2.Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Menurut James N. Rosenau terdapat tiga konsep kebijakan luar negeri , yaitu sebagai sekelompok orientasi, kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana tindakan, dan kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku. Sebagai sekumpulan orientasi, kebijakan luar negeri mengacu pada sikap, persepsi, dan nilai-nilai, dan semua ini berasal dari pengalaman sejarah negara dan keadaan strategis yang menandai tempatnya dalam politik dunia. Rumpun orientasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara negara ketika dihadapkan pada kondisi eksternal yang mengharuskan mereka mengambil keputusan dan bertindak. Dengan kata lain, hal ini merupakan kecenderungan dan prinsip umum yang mendasari perilaku negara di arena politik internasional. Sebagai seperangkat komitmen dan rencana tindakan, kebijakan luar negeri menunjukkan strategi pengungkapan, keputusan nyata, dan kebijakan yang dapat diamati, yang diambil ketika negara terhubung dengan lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri sebagian besar dapat diamati dan terdiri dari tujuan dan sarana khusus untuk mencapainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komitmen dan rencana aksi merupakan penjabaran dari cluster of orientations, yang dibuat ketika para pengamat atau analis mengacu pada pembuatan politik luar negeri. Sedangkan sebagai bentuk perilaku, politik luar negeri mengacu pada fase empirisnya yang melibatkan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan konkrit yang mengikuti penjabaran dari generalized orientations of foreign policy. Dilihat dari sudut ini, dengan kata lain, kebijakan luar negeri tampak sebagai perilaku eksternal negara (Rosenau et al., 1976).

Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis kebijakan luar negeri *Pacific Elevation* melalui teori kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh N. Rosenau. Melalui tinjauan tersebut, kita dapat melihat bagaimana *Pacific Elevation* melalui 3 konsep N. Rosenau.

2.2.2. Teori Soft Power

Dalam menjawab rumusan masalah, peneliti juga menggunakan teori *Soft Power* yang akan menjadi teori minor untuk melengkapi teori mayor. Peneliti menggunakan teori *Soft Power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye. Joseph Nye menjelaskan bahwa suatu negara setidaknya memiliki beberapa unsur dalam melancarkan pengaruhnya melalui *Soft Power*. Unsur tersebut seperti budaya, nilai politis, dan juga kebijakan luar negeri (Nye, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada budaya dan kebijakan luar negeri yang dijadikan *Soft Power* oleh Indonesia pada isu yang akan diteliti. Sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi isu terkait, dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki prinsip bebas aktif, lebih memilih untuk menggunakan pendekatan *Soft Power* dalam merespon tuduhan, kritikan, dan dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat. *Pacific Elevation* sebagai strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang baru sebagai usaha untuk membentuk konektivitas dengan negara-negara Pasifik terutama Vanuatu dan sebagai usaha untuk menjaga kedaulatan NKRI.

2.2.3. Diplomasi Buku Cek

Kebijakan luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif, yang artinya bahwa Indonesia lebih memilih untuk pendekatan secara damai dalam menghadapi suatu isu. Implementasi yang dianut oleh kebijakan luar negeri Indonesia salah

satunya adalah dilakukannya diplomasi. Dalam menjalin hubungan yang baik, banyak sekali cara diplomasi yang dilakukan suatu negara, salah satunya adalah diplomasi buku cek. Dalam menjawab rumusan masalah diatas, maka peneliti juga mencantumkan diplomasi buku cek sebagai pelengkap dari teori yang sudah ada. Diplomasi buku cek merupakan diplomasi yang memanfaatkan ekonomi seperti pinjaman, donasi, dan investasi kepada suatu negara dengan harapan akan terciptanya dan terpeliharanya hubungan formal (Mesak et al., 2020). Indonesia menggunakan diplomasi buku cek dalam meredam konflik yang terjadi dengan Vanuatu. Berkaca pada tahun 2015 ketika Vanuatu terdampak oleh Topan Pam, Indonesia melakukan donasi kepada Vanuatu. Pada tahun tersebut, kritik Vanuatu terhadap Indonesia di sidang PBB berhenti.

2.3. Asumsi Penelitian

Setelah memaparkan latarbelakang, menemukan rumusan masalah dan melakukan tinjauan literatur dari sumber penelitian sebelumnya , kemudian muncul asumsi sebagai analisa pertama sebagai landasan berpikir dan dugaan awal yang kebenerannya harus diuji.

Indonesia dengan kebijakan luar negerinya yang baru di kawasan Pasifik yaitu '*Pacific Elevation*', merupakan sebuah komitmen Indonesia dalam menjalin kerjasama secara bilateral maupun secara regional, Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan bantuan langsung untuk negara-negara Pasifik. '*Pacific Elevation*' dibuat dengan tujuan untuk membangun konektivitas antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu. Meningkatnya interaksi, konektivitas dan keterikatan dapat mengatasi dukungan negara-negara Pasifik, terutama Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat.

Konsep '*Pacific Elevation*' disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada tahun 2019. Pada tahun selanjutnya 2022, Vanuatu tidak lagi terlihat memberikan kritik terhadap Indonesia maupun melakukan kampanye terhadap kemerdekaan Papua Barat pada forum PBB yang biasanya dilakukan setiap tahunnya. Peneliti berasumsi *Pacific Elevation* dapat meningkatkan hubungan yang baik antara Indonesia dengan Vanuatu yang kemudian akan mengurangi dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat serta menumbuhkan hubungan yang baik diantara negara-negara pasifik termasuk Vanuatu di dalamnya.

2.4. Kerangka Analisis

Kerangka analisis dilakukan untuk mempermudah penjelasan dan alur dari penelitian yang dilakukan, serta elaborasinya dengan teori yang akan dipakai dalam menjawab rumusan masalah.

